

Analisis Kualitas Pendidikan dalam Perspektif Pemerataan Akses dan Mutu Sekolah di Kabupaten Gowa

¹Megawati A, ²Muh Natsir, ³Aryandi Sudika

^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia*

Corresponding Author  Andika.sudika@gmail.com

ABSTRACT

Article Info

Article history:

Received

February 03,
2025

Revised

March 17,
2025

Accepted

June 29, 2025

This study aims to analyze the quality of education in Gowa Regency by examining the aspects of equitable access and school quality. In the context of educational decentralization, ensuring equal quality of education remains a significant challenge in the region. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate a persistent disparity between schools in urban and rural areas, particularly in terms of teacher distribution, infrastructure, and academic achievement. The study recommends the need for targeted policy interventions to improve equitable access and the overall quality of education across all areas of Gowa Regency.

Keywords: Education, Equitable Access, School Quality, Disparity, Decentralization, Gowa Regency.

Journal Homepage <http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Namun, tantangan pemerataan pendidikan masih menjadi isu utama di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gowa. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan berdampak pada terhambatnya keadilan pendidikan bagi seluruh peserta didik (Tilaar, 2003). Dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional, pemerataan akses dan mutu merupakan pilar utama dalam mencapai pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan (Kemendikbud, 2020).

Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan, memiliki karakteristik geografis yang beragam dengan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpencar. Kondisi ini sering kali menyebabkan ketimpangan dalam hal distribusi tenaga pendidik, kualitas infrastruktur, dan akses peserta didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Beberapa sekolah di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Somba Opu menunjukkan perkembangan sarana prasarana dan SDM yang memadai. Sebaliknya, sekolah-sekolah di wilayah pegunungan atau pelosok seperti Kecamatan Tombolo Pao dan Biringbulu masih menghadapi tantangan kekurangan guru, minimnya fasilitas belajar, dan keterbatasan akses teknologi.

Selain ketimpangan fisik dan geografis, terdapat pula tantangan dalam penyediaan tenaga pendidik yang profesional dan merata. Pemerataan guru berkualifikasi baik, terutama untuk mata pelajaran inti, masih menjadi pekerjaan rumah yang signifikan. Sementara itu, digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi solusi justru memperlebar kesenjangan, karena infrastruktur TIK di daerah terpencil belum memadai. Sejumlah studi sebelumnya telah membahas isu pemerataan pendidikan dan kualitas sekolah di Indonesia, seperti Muhaimin (2014) menyoroti ketimpangan distribusi guru di wilayah

pedalaman. Aminuddin & Syarif (2018) meneliti disparitas fasilitas antara sekolah di wilayah kota dan desa. Supriatna (2020) menilai implementasi zonasi pendidikan dalam konteks akses. Namun demikian, terdapat kekosongan kajian yang secara khusus: Menganalisis hubungan langsung antara akses dan mutu pendidikan secara kontekstual di tingkat kabupaten, khususnya di wilayah dengan kompleksitas geografis seperti Gowa Menyediakan data empiris lapangan yang membandingkan kondisi nyata antara sekolah perkotaan dan pedesaan, bukan hanya berdasarkan agregat data nasional atau provinsi serta Menawarkan model solusi kontekstual berbasis kebijakan lokal untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dalam aspek akses dan mutu secara bersamaan.

Dengan kata lain, literatur yang menggabungkan analisis pemerataan akses pendidikan dan kualitas sekolah dalam satu bingkai penelitian di tingkat daerah masih terbatas.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam tiga aspek utama: 1) Pendekatan Integratif: Mengkaji kualitas pendidikan dari dua perspektif secara bersamaan, yaitu *akses* dan *mutu sekolah*, yang umumnya diteliti secara terpisah. 2) Konteks Lokal yang Spesifik: Fokus pada Kabupaten Gowa sebagai studi kasus yang belum banyak dikaji secara mendalam, terutama menyangkut dinamika wilayah geografis (perkotaan vs pedesaan), distribusi guru, serta infrastruktur pendidikan berbasis data empirik langsung dari lapangan. 3) Rekomendasi Solusi Kontekstual: Menghasilkan model rekomendasi berbasis kebutuhan lokal yang mempertimbangkan potensi dan tantangan daerah, bukan sekadar adaptasi dari kebijakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah literatur tentang pemerataan pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat daerah yang berbasis data dan realitas lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kondisi pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang berkaitan dengan kualitas pendidikan secara kontekstual dan mendalam (Creswell, 2014). Pemilihan subjek dilakukan secara **purposive sampling**, yaitu berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pengalaman mengelola sekolah di wilayah dengan akses terbatas dan pemahaman terhadap kebijakan mutu Pendidikan. Data dianalisis dengan menggunakan model **Miles dan Huberman (1994)** yang meliputi tiga tahapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu pemerataan akses pendidikan dan mutu sekolah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dari beberapa sekolah dasar dan menengah pertama di wilayah perkotaan (Kecamatan Somba Opu) dan pedesaan (Kecamatan Tombolo Pao dan Biringbulu).

Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru, ditemukan bahwa siswa di wilayah pedesaan seperti Tombolo Pao dan Biringbulu harus menempuh jarak lebih dari 3 km dengan berjalan kaki untuk mencapai sekolah. Infrastruktur jalan yang kurang memadai dan minimnya transportasi umum memperparah kondisi tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kehadiran siswa dan tingginya angka putus sekolah di beberapa desa.

Sebaliknya, sekolah di wilayah Somba Opu, yang merupakan daerah perkotaan, lebih mudah diakses oleh siswa. Fasilitas jalan yang baik, tersedianya transportasi umum, serta lokasi sekolah yang dekat dengan pemukiman warga membuat akses pendidikan di wilayah ini lebih merata dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran.

Fenomena ini menunjukkan ketimpangan yang nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan, sebagaimana diungkapkan oleh World Bank (2018) bahwa hambatan geografis merupakan salah satu

faktor utama penghambat pemerataan akses pendidikan, khususnya di negara berkembang.

Mutu Sekolah

Mutu sekolah ditentukan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan dan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta proses dan hasil belajar. Di Kabupaten Gowa, terdapat disparitas yang signifikan antara mutu sekolah di daerah kota dan desa. Sekolah di wilayah Somba Opu umumnya memiliki guru yang berkualifikasi dan tersertifikasi, fasilitas belajar seperti laboratorium, perpustakaan, dan koneksi internet yang memadai. Di sisi lain, sekolah di Tombolo Pao dan Biringbulu masih kekurangan guru, terutama pada mata pelajaran inti seperti Matematika dan IPA. Guru-guru di daerah tersebut juga mengajar lebih dari satu mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik.

Selain itu, banyak sekolah di daerah pedesaan yang tidak memiliki perpustakaan, laboratorium, atau fasilitas sanitasi yang layak. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas proses pembelajaran, yang berimbas pada hasil belajar siswa. Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa nilai rata-rata ujian akhir sekolah di daerah pedesaan berada di bawah rata-rata kabupaten.

UNESCO (2005) menyatakan bahwa kualitas pendidikan mencakup input, proses, dan output. Jika input seperti guru dan sarana tidak memadai, maka proses belajar akan terganggu dan output pendidikan pun menurun. Hal ini sejalan dengan temuan Sallis (2002) bahwa mutu pendidikan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya sekolah dan dukungan kebijakan pemerintah.

Ketimpangan Digital dan Inovasi Pembelajaran

Di era digital, teknologi informasi seharusnya menjadi penopang pendidikan yang merata. Namun, di Kabupaten Gowa, ketimpangan digital masih menjadi masalah. Sekolah di daerah perkotaan telah menerapkan pembelajaran berbasis digital seperti penggunaan Learning Management System (LMS) dan platform e-learning. Sementara itu, sekolah di daerah terpencil belum memiliki akses internet stabil bahkan ada yang belum memiliki komputer.

Dalam wawancara dengan beberapa guru, ditemukan bahwa keterbatasan akses terhadap teknologi membuat guru sulit mengembangkan model pembelajaran inovatif. Akibatnya, proses belajar masih didominasi oleh metode ceramah dan hafalan, bukan pembelajaran aktif dan kontekstual seperti yang ditekankan dalam Kurikulum Merdeka. Temuan ini diperkuat oleh laporan Kemendikbud (2020) yang menyatakan bahwa hanya 53% sekolah di daerah terpencil yang memiliki koneksi internet layak untuk mendukung digitalisasi pendidikan.

Upaya Pemerintah Daerah dan Tantangan Implementasi

Pemerintah Kabupaten Gowa telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasi ketimpangan akses dan mutu pendidikan, di antaranya:

1. Penempatan guru kontrak daerah untuk daerah 3T
2. Pengadaan bantuan operasional daerah (BOSDA) untuk rehabilitasi sekolah
3. Pelatihan guru melalui kerja sama dengan LPMP dan universitas lokal

Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah dan kurangnya minat guru untuk ditempatkan di daerah terpencil. Banyak guru yang mengajukan mutasi setelah satu tahun mengajar di daerah tersebut. Selain itu, pemanfaatan anggaran seringkali tidak optimal karena kurangnya kapasitas manajemen sekolah di daerah terpencil. Muhaimin (2014) menekankan bahwa pemerataan pendidikan memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup insentif berbasis kinerja, kebijakan rotasi guru yang adil, serta penguatan kapasitas pengelolaan sekolah.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.
2. Pengembangan program digitalisasi sekolah harus difokuskan pada daerah 3T dengan dukungan CSR dan kolaborasi swasta.
3. Perlu adanya pelatihan khusus manajemen sekolah untuk kepala sekolah di daerah pedesaan.
4. Penerapan kebijakan zonasi harus mempertimbangkan aspek geografis dan sosial-budaya lokal.

Dengan pendekatan berbasis lokal dan partisipatif, diharapkan pemerataan pendidikan yang adil dan bermutu di Kabupaten Gowa dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa: Pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Gowa masih menghadapi kendala serius, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Faktor geografis, keterbatasan sarana transportasi, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi penghambat utama dalam memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh peserta didik. Mutu sekolah sangat dipengaruhi oleh disparitas sumber daya pendidikan. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, guru yang kompeten dan tersertifikasi, serta akses terhadap teknologi pembelajaran. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru, sarana prasarana yang terbatas, dan rendahnya dukungan terhadap pengembangan profesional tenaga pendidik. Ketimpangan digital memperparah kesenjangan mutu pendidikan, di mana sekolah-sekolah di daerah kota sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis digital, sedangkan sekolah-sekolah di desa masih bergantung pada metode pembelajaran konvensional karena keterbatasan infrastruktur TIK. Upaya pemerintah daerah sudah diarahkan pada peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan, seperti penempatan guru kontrak dan pelatihan guru. Namun, keterbatasan anggaran dan rendahnya minat guru untuk mengabdikan diri di wilayah terpencil menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut dan Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan pendidikan yang kontekstual, berbasis data lokal, dan berorientasi pada keadilan spasial, agar pemerataan pendidikan di Kabupaten Gowa dapat tercapai secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Aminuddin, I., & Syarif, H. (2018). Pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan: Realitas dan harapan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(2), 102–115.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kemendikbud. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muhaimin, A. (2014). Pemerataan guru dan dampaknya terhadap pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 5(1), 34–42.
- OECD. (2012). *Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264130852-en>
- Sallis, E. (2002). *Total quality management in education* (3rd ed.). London: RoutledgeFalmer.
- Supriatna, A. (2020). Evaluasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 11(1), 19–28.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Membenahi pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

UNESCO. (2005). *Education for All global monitoring report: The quality imperative*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

World Bank. (2018). *Facing forward: Schooling for learning in Africa*. Washington, DC: World Bank Group.